

**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, KOMITE  
AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
(Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2010-2014)**

**Hustna Dara Sarra  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan *Effective Tax Rate*. Variabel independen yang diteliti antara lain konservatisme akuntansi, komite audit dan dewan komisaris independen.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri sektor kimia dan logam selama tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan dan *annual report* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan negative dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Penghindaran Pajak, Effective Tax Rate, Konservatisme Akuntansi, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen*

**I. PENDAHULUAN**

Pajak sesuai pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi, (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

membayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, sedangkan *regularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu kepada *self assisment* dengan sistem ini wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang. Dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Untuk itu manajemen perusahaan harus jeli memaksimalkan hal-hal yang menjadi haknya dan meminimalkan kewajiban tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan baik. Beban pajak yang tinggi mendorong setiap perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari

perusahaan atau organisasi tersebut dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimal bagi perusahaan (Pohan, 2013: 13). Jadi manajemen pajak merupakan bagian integral dari perencanaan strategi perusahaan, fungsi dari manajemen pajak diantaranya adalah *tax planning* yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.

Pada dasarnya *tax avoidance* dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Pada hakekatnya tindakan penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Namun dalam Kegiatan ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion* (Pohan, 2013: 24). Maka dari itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit di satu sisi menurut peraturan pajak tidak dilarang akan tetapi di satu sisi sering kali mendapat sorotan yang kurang baik

karena dianggap memiliki konotasi negatif.

Ilyas & Priantara (2013: 5) menjelaskan bahwa direktorat jenderal (ditjen) pajak kementerian keuangan mencatat adanya kerugian negara Rp 1,55 triliun karena wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Ini berasal dari 26 kasus pajak yang ditangani tahun 2013. Direktur intelijen dan penyidikan ditjen pajak, saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Bahkan kasus penyelewengan pajak trennya terus meningkat dari tahun ketahun. Tren naik karena pengawasan dan penyetoran pajak cukup lemah untuk itu pihak direktorat pajak perlu melakukan pengawasan-pengawasan yang dilakukan dengan model-model dan verifikasi data di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan penegakan hukum terhadap penyelewengan pajak.

Di lihat dari fenomena di atas dari sudut pandang kebijakan pajak, praktek penghindaran pajak berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang merugikan negara dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Untuk itu kontribusi pajak harus lebih dioptimalkan karena kontribusi pajak semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Dari sudut pandang perusahaan, pajak adalah biaya yang akan mengurangi laba sedangkan salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Konservatisme merupakan alasan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manager yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bas news in earning*) (jaya, Arafat dan Kartika 2014). Konservatisme terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran. Hal yang sering terjadi sehubungan dengan konsep ini adalah keuntungan tidak diakui sampai benar-benar terjadi. Konservatisme akuntansi dalam perusahaan diterapkan dalam tingkat yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan

tidak menyesatkan bagi investornya (Baharudin dan Wijayanti, 2011).

Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan dikatakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka dilakukan berbagai macam tindakan antara lain pembentukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dapat mengawasi kinerja perusahaan dalam hal perpajakan perusahaan. Mekanisme *corporate governance* merupakan serangkaian peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem pengarah dan pengendali perusahaan.

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Salah satu mekanisme dari sistem *corporate governance* adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai bagian dari *corporate governance*

komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris melakukan pengendalian dan mengkoordinasikan terhadap perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat.

Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan proses penyusutan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Komite audit di angkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi Halim (2012). Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian Prakosa (2014) profitabilitas dan ukuran perusahaan kepemilikan keluarga dan *corporare governance* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, hal ini di duga tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecendrungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. *Corporate governance*, Konservatisme akuntansi dan *tax avoidance*. Jaya, Arafat dan Kartika (2014) dalam penelitiannya menyatakan *corporate governance* yg diukur dengan komposisi kepemilikan saham, ukuran dewan direksi dan kualitas audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak begitu juga dengan prinsip konservatisme akuntansi bukanlah faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah pengaruh konservatisme akuntansi, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak.

## II. KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS PENELITIAN

### Kajian Teoritis

Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajemen (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*).

Menurut Jensen and Meckling dalam Rusydi dan Martani (2014)

manager sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai *principal*. Agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, manager diberi insentif yang cukup dan dengan mengeluarkan biaya monitoring untuk membatasi penyimpangan oleh manajer dalam teori keagenan, masalah keagenan timbul karena diasumsikan bahwa manajer bertindak *self interest*. Untuk itu muncul

biaya-biaya keagenan untuk mengatasi masalah ini.

Tujuan utama dengan adanya *agency theory* tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. *Theory agency* juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda termasuk dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola suatu perusahaan (hanum dan Zulaikha, 2013).

Keputusan manajer untuk melakukan *tax avoidance* mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi manajer (misalnya kepentingan terhadap laba yang tinggi). Namun demikian, bisa saja keputusan ini bukan merupakan keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Manajer mungkin saja hanya mengambil keputusan *tax avoidance* berdasarkan kepentingan jangka pendek. Pemegang saham di sisi lain akan memandang dari sudut pandang kepentingan jangka panjang. Dari sinilah muncul masalah keagenan di mana kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemegang saham (wahyudi, 2014). Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan.

Perlakuan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, dimana satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, dan sisi lainnya pemegang saham ingin menekankan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjebatani *agency problem* ini digunakan *tax avoidance*

dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013: 23).

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Barr NA, 1977 dalam Ilyas & Priantara, 2013: 16) atau pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* menurut peraturan pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan ( khurana dan mores, 2009).

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu diperlukan pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan tidak langsung

untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan / laba kena pajak (*GAP between financial and taxable income*), perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan *GAAP/SAK*, sedangkan ke kantor pelayanan pajak dengan peraturan perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap* (Desai dan Dharmapala, 2007). Rusydi dan Martani (2014) menyatakan bahwa *ETR* merupakan salah satu pengukur *Tax avoidance*.

### Konservatisme Akuntansi

Konservatisme dapat didefinisikan sebagai praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespons berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespon berita baik (*good news*) (Basu dalam Baharudin dan Wijayanti, 2011). Prinsip konservatisme akuntansi diartikan sebagai pencatatan aktiva milik perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga perolehannya (*cost*) atau mencatat hutang lebih tinggi (*Over-stated*), selain itu mengakui kemungkinan rugi yang terjadi namun tidak mengantisipasi laba yang belum direalisasi (tidak diakui sebagai pendapatan periode ini) (Sugiono, Soenarno, dan Kusumawati 2010: hal 21).

Konservatisme (*conservatism*) terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian pengukuran. Hal yang paling sering terjadi sehubungan dengan konsep ini adalah keuntungan tidak diakui sampai benar-benar terjadi. Konservatisme akuntansi merupakan penentu kualitas laba. Meskipun laporan keuangan yang konservatif dapat mengurangi kualitas laba. (Buffet dalam Subramanyam & Wild, 2014: 92) memandang akuntansi

konservatif sebagai tanda dari kualitas laba yang lebih baik. Kontradiksi ini dapat dijelaskan oleh konservatisme yang tercermin pada tanggung jawab, tingkat ketergantungan, dan kredibilitas manajemen bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif, yang disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. (Handojo, 2012).

### Corporate Governance

*Corporate governance* dapat diartikan sebagai tata kelola yang baik dimana terdapat suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes dan Ardana, 2009). *Corporate governance* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009 dalam Hanum & Zulaikha, 2013).

*Internal governance* meliputi struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Sedangkan *external governance* terdiri dari institusional *ownership*, pasar dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*) (Bambang dan Rosestein, 1998) dalam Andayani (2010). kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.

1. Komite audit dimana anggotanya minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan diketuai oleh seorang komisaris independen.
2. Sekretaris perusahaan.

### Komite audit

Daniri dalam Annisa & Kurnia (2012) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah

menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance*. Menurut Komite Nasional kebijakan *Corporate Governance* mengenai Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Sedangkan menurut Tugiman (1995: 8) pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independennya dari manajemen.

Pada umumnya, komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Pohan, 2008 dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit diukur dari jumlah komite audit, komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. (Annisa dan Kurniawan, 2012) dalam penelitiannya komite audit diukur

dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

### **Dewan Komisaris Independen**

Mulyadi (2002) menyebutkan bahwa dewan komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau pihak komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang – kurangnya tiga puluh persen (30 %) dari seluruh anggota komisaris disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Annisa dan Kurniasih, 2012).

### **Hipotesis Penelitian**

#### **1. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak**

Secara tradisional, konservatisme dalam akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan tidak

mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian (bliss, 1924, Watts, 2003 dalam Jaya, Arafat dan Kartika, 2014). Pengakuan pendapatan lebih dini akan meningkatkan penjualan dan laba jangka pendek. Konservatisme mengacu kepada pepatah lama semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi (Subramanyam & Wild, 2014: 92). Jaya, Arapat & Kartika, (2014) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. (Warren Buffet dalam Subramanyam & Wild, 2014: 92) memandang akuntansi konservatif sebagai tanda dari kualitas laba yang lebih baik dan masalah pajak secara tidak langsung berhubungan dengan pengaturan atau manajemen laba. atas dasar uraian tersebut hipotesis yang diajukan

H<sub>1</sub>: Konservatisme akuntansi berpengaruh positif pada kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## 2. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Aktivitas audit yang dilakukan Kantor Akuntansi Publik terhadap perusahaan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menilai kinerja dari manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. (Annisa dan Kurniawan, 2012) dalam penelitiannya menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap

penghindaran pajak. Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan untuk hipotesis yang diajukan:

H<sub>2</sub>: Komite audit berpengaruh positif pada kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## 3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan menganalisis untuk memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moers, 2009). Untuk itu persentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh yang positif dari dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

#### 4. Konservatisme akuntansi, Komite audit, dan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.

Hipótesis ini menguji pengaruh yang terjadi antara keempat variabel independen (Konservatisme akuntansi, Komite audit, dan Komisaris Independen) terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hipótesis ini akan diuji dengan menggunakan uji simultan atau uji F. Dengan demikian hipótesis yang di ajukan sebagai berikut

H<sub>4</sub> : terdapat pengaruh yang positif secara bersamaan antara variabel independen (konservatisme akuntansi, komite audit, dan dewan komisaris independen) dalam kegiatan penghindaran pajak.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hanya akan menghasilkan data empiris yang valid dan akurat apabila metodologi yang digunakan dapat mendukung proses pencapaian hasil pada akhirnya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan.

Pada penelitian ini penekanan pada penggunaan metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (sugiyono, 2013 : 35).

#### Definisi dan Pengukuran Variabel

##### Variabel dependen (Y)

##### *Tax avoidance*

Variabel dependen adalah yang dipengaruhi variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *effective tax rate (ETR)*, dihitung dari jumlah beban pajak penghasilan di bagi dengan total laba sebelum pajak. *effective tax rate* adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Tax avoidance diukur dengan menggunakan *effective tax rate* seperti halnya penelitian yang dilakukan Rusydi dan Martani (2014) menyatakan bahwa ETR merupakan salah satu pengukur *Tax avoidance*.

##### Variable independen (X)

##### Konservatisme akuntansi (X<sub>1</sub>)

Menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Handojo (2012) konservatisme diukur dengan menggunakan akrual. Apabila akrual bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif, yang disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu.

Konservatisme di ukur dengan menggunakan *accrual ítems* seperti halnya penelitian yang dilakukan Handojo, (2012) dalam penelitiannya untuk mengukur konservatisme dengan menggunakan akrual. Konservatisme (CONACC) merupakan perbandingan (NIO + DEP – CFO x (-1) dengan TA

Dimana:

CONACC = *Earning conservatism base don accrued ítems*

NIO = *Operating profit of current year*

CFO = *Net amount of cash flow from operating activities of current year*

DEP = *Depreciation of fixed assets of current year*

TA = *Book value of closing total assets.*

### **Komite audit (X<sub>2</sub>)**

Komite audit diukur dari jumlah komite audit, komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsi-prinsip pengawasan internal.

Komite audit di ukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan begitu juga dengan penelitian yang digunakan Annisa dan Kurniawan (2012) dalam penelitiannya komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Hanum dan Zulaikha (2013) dalam penelitiannya Komite audit di ukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

### **Dewan komisaris Independen (X<sub>3</sub>)**

Dewan komisaris berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Struktur dewan komisaris di ukur dengan persentasi dewan komisaris independen. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris

independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30 %) dari seluruh anggota komisaris disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Hanum dan Zulaikha 2013). Dengan komisaris independen dapat di ukur dengan menghitung proporsi  $\Sigma$  Komisaris Independen dengan  $\Sigma$  anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan seperti halnya penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniawan (2012) dalam penelitiannya.

### **Metode Pengambilan Sampel**

menurut Ridwan (2008:57) Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Adapun kriteria yang dipakai dalam pengambilan sampel, sebagai berikut:

1. Perusahaan industri sektor kimia dan logam yang ada di BEI untuk tahun 2010-2014
2. Perusahaan industri sektor kimia dan logam yang tidak listing berturut-turut selama tahun 2010-2014
3. Perusahaan industri sektor kimia dan logam yang menerbitkan laporan keuangan selain menggunakan mata uang rupiah.

### **Metode Analisis Data**

#### **Analisis statistik deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2012). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu statistik deskriptif menyajikan ukuran *numeric* yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS.

### Uji Asumsi klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat - syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2012:47). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu

garis lurus diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normal (Ghozali, 2012 : 149).

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak, dapat dijelaskan dengan pedoman sebagai berikut:

1. nilai signifikan atau nilai probabilitas  $> 0,05$  maka data residual terdistribusi dengan normal.
2. nilai signifikan atau nilai probabilitas  $< 0,05$  maka data residual terdistribusi tidak normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen) atau tidak. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Jika terdapat korelasi antara variabel independennya maka variabel-variabel tersebut tidak

*orthogonal*. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2012 : 95)

Gejala multikolinearitas dapat terdeteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* digunakan untuk mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau sama dengan  $VIF > 10$  (Ghozali, 2012: 95)

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier adalah korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2012: 99).

salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji *durbin-watson* (*DW test*). *Durbin-watson* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen (Ghozali, 2012: 99).

Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya terjadi autokorelasi, sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Kriteria Uji Autokorelasi**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Diterima	$du < d < 4-du$

Sumber : Ghozali (2012)

#### Uji heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroksiditas (Ghozali, 2012: 125)

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar

secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji glenjser yaitu meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen, jika probabilitas signifikannya diatas angka kepercayaan 9% maka terdapat heterokedastisitas (Ghozali, 2012:125).

### Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksikan hubungan antara konservatisme akuntansi, komite audit, dewan komisaris independen dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 CONACC + \beta_2 CA + \beta_3 INDEP + e$$

Keterangan:

ETR	= <i>Effective Tax Rate</i>
$\alpha$	= Konstanta
CONACC	=Konservatisme Akuntansi
CA	= Komite Audit
INDEP	=Dewan Komisaris Independen
$e$	= <i>Error</i>

### Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2012: 87). Banyak peneliti menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam kenyataan ini *adjusted R<sup>2</sup>* dapat bernilai *negative*, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2012: 87). Menurut Gujarat dalam Ghozali jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted R<sup>2</sup> negative*, maka nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dianggap bernilai nol.

### Uji - t

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2012: 88).

Maka pedoman pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Bila hasil t sig < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya variabel tersebut signifikan, artinya terdapat pengaruh yang nyata. Bila t sig > 0,05 maka Ho diterima yang artinya variabel tersebut tidak signifikan atau tidak ada pengaruh antara variabel yang bersangkutan dengan variabel Y.
2. Bila t hitung > dari t tabel maka Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Bila t hitung < dari t tabel maka Ho diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. untuk mengetahui t hitung dapat dicari pada tabel statistik dengan syarat tingkat sig  $\alpha = 5\%$  *Degree of Freedom*, dfl = jumlah variabel - 1

(k-1) dan  $df_2 =$  jumlah sampel – jumlah variabel (n-k).

#### Uji - F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2012: 88)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Nilai  $F_{sig} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dan jika nilai  $F_{sig} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas X terhadap variabel Y dan bila  $F_{hitung} <$

$F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai F tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan syarat tingkat  $\alpha = 5\%$  *Degree of Freedom*,  $df_1 =$  jumlah variabel – 1 (k-1) dan  $df_2 =$  jumlah sampel – jumlah variabel (n-k).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang menjelaskan nilai statistik nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, nilai maksimum dan nilai minimum dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai konservatisme akuntansi, komite audit, proporsi dewan komisaris independen dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Tabel 2.**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CONACC	55	-,40	,20	-,0613	,12919
CA	55	2,00	5,00	3,1455	,65030
INDEP	55	,00	,67	,3216	,14887
ETR	55	-,45	4,33	,3527	,59554
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data yang diolah *statistical product and service solution (SPSS)*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai dari data variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan model dari variabel dependen diperoleh nilai rata-rata 0,3527 dengan nilai terendah -0,45 dan nilai tertinggi 4,33. Dari tabel diatas PT. Alakas Industrindo, Tbk memperoleh nilai terendah yaitu -0,45 dan nilai tertinggi di peroleh PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. Semakin kecil nilai akrual suatu perusahaan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin tinggi.

Variabel konservatisme akuntansi mempunyai nilai rata-rata -0,0613 dengan nilai terendah -0,40 dan nilai tertinggi 0,20 dengan standar deviasi 0,129 . berdasarkan tabel diatas perusahaan yang mempunyai nilai terendah adalah PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk dengan nilai -0,40 untuk nilai tertinggi PT. Eterindo Wahanatama, Tbk dengan nilai 0,20. Semakin kecil nilai akrual suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Variabel komite audit mempunyai nilai *mean* 3,1455 dengan nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 5,00 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,65030. PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk mempunyai nilai maximum yaitu 5,0 dan nilai terendah di peroleh PT. Intan Wijaya Chemicals Industry, Tbk dengan nilai 2,0. Nilai rata-rata komite audit yang positif menunjukkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Variabel proporsi dewan komisaris independen mempunyai nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,67 dan nilai rata-rata 0,3216 dengan nilai

standar deviasi 0,14887. Nilai terendah di peroleh PT. Intan Wijaya Chemicals Industry, Tbk dengan nilai 0,00 dan nilai maksimum PT. Eterindo Wahanatama, Tbk dengan nilai 0,67. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris independen dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan Uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dilakukan terhadap data residual model regresi. Adapun pengujian total sample data disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.**  
**Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		55
Norma	Mean	0E-7
l		
Param	Std.	
eters <sup>a,b</sup>	Deviation	,49558042
Most	Absolut	
Extre	e	,155
me		
Differ	Positive	,155
ences	Negative	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		1,146
Asymp. Sig. (2-tailed)		,144

Sumber : Data diolah SPSS

Dari tabel di atas menunjukkan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,144 dan nilai variabel independen yang memiliki signifikansi lebih dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen) atau tidak kolinearitas diantara variabel independennya. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Agar tidak terjadi multikolinearitas, batas *tolerance value*  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$  (karena  $VIF = 1/tolerance$ ).

**Tabel 4.**  
**Uji Multikolinearitas**  
**"Coefficients"**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
CONACC	,960	1,042
CA	,810	1,235
INDEP	,817	1,224

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel diatas, *tolerance value*  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terdapat hubungan multikolinearitas dan dapat digunakan.

#### Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson* untuk mencari ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian yaitu dengan membandingkan nilai  $DW_{hitung}$  dengan  $DW_{tabel}$ . Dari hasil pengujian yang dilakukandapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 5.**  
**Uji Autokorelasi**

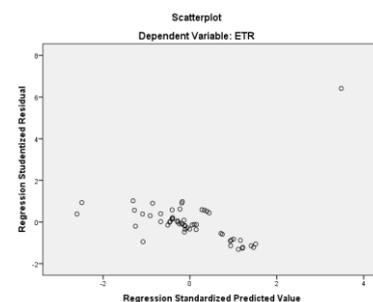
Model	Durbin-Watson
1	2,209

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel diatas diketahui nilai  $DW_{hitung}$  sebesar 2,209. Dari hasil tabel Durbin Watson diketahui  $n = 55$ ,  $k=3$  dengan  $\alpha = 0,05$  diperoleh nilai  $dl = 1,4253$  dan  $du = 1,6815$  Berdasarkan data tersebut diketahui  $1,6815 < 2,209 < 2,3185$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini digunakan diagram titik (*scatter plot*) yang seharusnya titik-titik tersebut tersebar acak agar tidak terdapat heterokedastisitas.



**Gambar 1.**  
**Scatterplot**

Apabila dilihat dari grafik plot, terlihat titik-titik tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan pada model regresi ini.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksikan antara konservatisme akuntansi, komite audit, dewan komisaris independen dan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

**Tabel 6.**  
**Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-1,054	,460
CONACC	-1,853	,548
CA	1,057	,442
INDEP	,290	,516

Sumber : Data diolah SPSS

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = - 1,054 - 1,853 \text{ CONACC} + 1,057 \text{ CA} + 0,290 \text{ INDEP} + e$$

Dari model regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar -1,054 berarti bahwa jika tidak ada pengaruh dari variabel-variabel bebas (X) maka nilai penghindaran pajak (*tax avoidance*) penelitian ini sebesar -1,054.

Koefisien regresi CONACC ( $X_1$ ) sebesar -1,853 menunjukkan bahwa setiap perubahan sebesar 1 akan memberikan pengaruh penurunan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y) sebesar -1,835 dengan asumsi faktor-faktor lainnya tidak berubah.

Koefisien regresi CA ( $X_2$ ) sebesar 1,057 menunjukkan bahwa setiap perubahan sebesar 1 akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y) sebesar 1,057 dengan asumsi faktor-faktor lainnya tidak berubah.

Koefisien regresi INDEP ( $X_3$ ) sebesar 0,290 menunjukkan bahwa setiap perubahan sebesar 1 akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y) sebesar 0,290 dengan asumsi faktor-faktor lainnya tidak berubah.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2012 : 87).

Berikut adalah hasil dari uji koefisien Determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) uji statistik t (parsial) dan uji statistik f diuji menggunakan program data statistik spss terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7.**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,555 <sup>a</sup>	,308	,267

Sumber : Data diolah SPSS

Nilai *adjusted R<sup>2</sup> Square* sebesar 0,267 hal ini berarti menunjukkan 26, 7% penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat di pengaruhi variabel independen konservatisme akuntansi, komite audit, dewan komisaris independen. Sedangkan sisanya sebesar 73,3 % kemungkinan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### Uji t (*t-test*)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan *sig* dari t dengan tingkat signifikansi yang diambil dalam hal ini 0,05 jika nilai *sig* dari t < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 8.**  
**Uji t**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-2,293	,026
CONACC	-3,379	,001
CA	2,390	,021
INDEP	,562	,577

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan data tabel uji T diatas dapat dilihat dengan degree of freedom (df) = n - k = 52 atau df = 55-3 dimana jumlah sampel sebesar (n) = 55, dan jumlah variabel (k) = 3 taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka diperoleh nilai tabel 2,006

Dari uji t diatas maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

#### 1. Konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari hasil penelitian ini diperoleh hasil uji t variabel konservatisme akuntansi diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,379 sedangkan  $t_{tabel}$  2,006 dan nilai probabilitas sebesar 0,001. Dikarenakan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai probabilitas sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial konservatisme akuntansi berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### 2. Komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil uji t untuk variabel komite audit diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 2,390 sedangkan  $t_{tabel}$  2,006 dan nilai probabilitas sebesar 0,021. Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai probabilitas sebesar 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima sehingga dapat

dikatakan bahwa secara parsial komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 3. Dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil uji t untuk variabel dewan komisaris sebesar diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 0,562 sedangkan  $t_{tabel}$  2,006 dan nilai probabilitas sebesar 0,577. Dikarenakan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai probabilitas sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### Uji F (*F-test*)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antara konservatisme akuntansi, komite audit, dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara bersama-sama (simultan).

**Tabel 9.**  
**Uji F**

Model	F	Sig.
1 Regression	7,550	,000 <sup>b</sup>
Residual		
Total		

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat dengan *Degree of freedom*

$df1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$  dan  $df2 = n - k = 55 - 4 = 51$ , dimana jumlah sampel ( $n$ ) = 55, jumlah variabel ( $k$ ) = 4, tariff signifikansi 5% atau 0,05, maka diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 2,79.

Hasil uji diketahui bahwa antara variabel independen terhadap variable dependen diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 7,550  $> F_{tabel}$  2,79 dan tingkat signifikan 0,000  $< 0,005$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima atau dapat dikatakan konservatisme akuntansi, komite audit dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat dibuktikan dari nilai tingkat signifikansinya 0,000.

#### Pembahasan

##### 1. Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa variabel konservatisme akuntansi mempunyai nilai sebesar -3,379 dan *p value* sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dimana variabel konservatisme akuntansi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga  $H_1$  Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan jaya, Arafat dan Kartika (2014) di dalam perpajakan prinsip konservatisme dapat terlihat pada beberapa kebijakan pemerintah seperti tidak diperkenankannya membentuk cadangan piutang ragu-ragu kecuali untuk bank dan *leasing* dengan hak opsi serta perusahaan asuransi dan cadangan

biaya reklame untuk usaha pertambangan dan hanya menggunakan metode harga perolehan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) tidak boleh menggunakan (LIFO) untuk menilai persediaan dan pemakaian untuk perhitungan harga pokok.

Dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan di dalam perpajakan. Prinsip konservatisme akuntansi digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan akan tetapi prinsip konservatisme merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba.

## 2. Pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa variabel komite audit mempunyai nilai sebesar 2,390 dan *p value* sebesar 0,021 lebih kecil dari  $\alpha$  0,005 dimana variabel komite audit berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga  $H_2$  Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan kualifikasi terpenting dalam komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu padangan yang independen. Pohan (2008) yang menyatakan BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang jadi

jika jumlah komite audit deraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisir laba untuk kepentingan pajak.

Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Dengan demikian komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan mempunyai pengaruh dalam menjalankan manajemen dan strategi perpajakan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## 3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini menemukan bukti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditolak dan tidak terbukti. Sejalan dengan penelitian Kesit bambang prakosa (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik dalam manajemen perusahaan hasil negative menunjukkan bahwa peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan untuk

melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) hal ini dikarenakan tugas dewan komisaris independen hanya mengontrol dan menasehati kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen sedangkan yang mengelola dan menjalankan aktivitas bisnis perusahaan secara langsung adalah pihak manajemen.

#### 4. Pengaruh konservatisme akuntansi, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji simultan atau uji F menunjukkan ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini menemukan bukti tiga variabel independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) diterima.

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip konservatisme akuntansi, yang diterapkan perusahaan dikatakan dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, begitu juga dengan komite audit yang bertugas memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Dimana laporan keuangan tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan karena penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan melalui manajemen dan strategi perpajakan yang dikelola

perusahaan. dan untuk dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan karena dewan komisaris hanya mengontrol dan menasehati kegiatan sedangkan yang mengelola dan menjalankan aktivitas bisnis perusahaan secara langsung adalah pihak manajemen.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. konservatisme akuntansi, komite audit dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### Rekomendasi

1. Pada penelitian di masa yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan.
2. Obyek pada Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari industri manufaktur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu, dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance*. *Jurnal akuntansi & auditing* Volume 8 nomor 2: 123-136.
- Baharudin, Ahmad Arif dan Provita Wijayanti, 2011. Mekanisme *corporate governance* terhadap konservatisme akuntansi di Indonesia. *Dinamika social ekonomi*. Volume 7 nomor 1:26-101.
- Darmawan, Sukartha, 2014. Pengaruh *corporate governance, leverage, return on asset* dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. ISSN : 2302-8556 *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.9.1: 143-161.
- Dudi wahyudi, 2014. Pengaruh *good corporate governance* dan pemeriksaan pajak terhadap *tax avoidance*. RPSEP-09.
- Desai ,M.A dan D. Dharmapala 2006. *Corporate governance, tax Avoidance and hight powered incentives*. *Journal of Financial Economic*, 79, 145-179.
- Ghozali, Imam 2012. *Analisi multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, H.R & Zulaikha, 2013. Pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *efektiv tax rate* study empiris pada BUMN 2009 – 2011. ISSN. 2 halaman 1-19.
- Hotman, T, Pohan, 2009. Analisis pengaruh kepemilikan institusi, *rasio tobing Q*, akrual pilihan, tariff efektif pajak dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan public. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 4 No. 2, halaman 113-135.
- I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana, 2014. Pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada *tax avoidance* perusahaan manufaktur. ISSN : 2302-8556 *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.2: 525-539.
- Ilyas dan Priantara, 2013. *Manajemen & perencanaan pajak berbasis resiko*. Jakarta : In Media.
- Irwanto Handojo, 2012. Sekelumut konservatisme akuntansi. *Media Bisnis*. Skripsi STIE Trisakti.
- Kesit Bambang Prakosa, 2014. Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak di

- Indonesia. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram.*
- Lodovicus Lasdi, 2009. Pengujian determinasi konservatisme akuntansi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol 1 No. 1.
- M. Khoiru Rusydi dan Dwi Martani, 2014. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap *aggressive tax avoidance*. *SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.*
- Prena, Gena Das 2012. Pengaruh keberadaan komisaris independen sebagai bagian penerapan *Board of directors (Implementasi Good Corporate Governance)* terhadap konservatisme pelaporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* Volume 2 Nomor 2.
- Pohan, Chairul Anwar. 2013. *Manajemen perpajakan. Strategi perencanaan pajak dan bisnis.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti 2011. *Perpajakan teori dan kasus.* Jakarta : Salemba Empat.
- Ridwan, 2008. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian.* Jakarta: Alfabeta
- Subramanyam dan Wild, 2014. *Analisis laporan keuangan, Financial statement analysis.* Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2013. *Metode penelitian manajemen.* Yogyakarta: Alfabeta.
- Suandy, Erly 2011. *Perencanaan pajak.* Jakarta: Salemba Empat.
- Silvia Ratih Puspita dan Puji Harto, 2014. Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting.* Volume 3, nomor 2, tahun 2014, halaman 1-13 ISSN (online) : 2337-3806.
- Sarwono, Jonathan, 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS.* Jakarta: Elexmedia dan Komputindo
- Tresna eka jaya, Arafat dan Kartika, 2014. *Corporate governance, konservatisme akuntansi dan tax avoidance.* *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan* 4.
- Tirus Bayu Santoso, 2014. Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Skripsi universitas diponegoro.
- Wahyono, Teguh 2012. *Analisis statistik mudah dengan SPSS 20.* Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diakses maret 2015 s/d agustus 2015
- Website [www.google.com](http://www.google.com) diakses maret 2015 s/d agustus 2015